



## Pengelolaan E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas

### E-Government Management at the Communication Information and Statistics Office of Musi Rawas Regency

Ayub<sup>1</sup>, Syafri Aprudi<sup>2</sup>, Kukuh Koeswanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas

<sup>2</sup>Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musi Rawas

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas

Email : [ayub\\_bn@yahoo.com](mailto:ayub_bn@yahoo.com), [syafri1971@gmail.com](mailto:syafri1971@gmail.com) , [kukuhkoes98@gmail.com](mailto:kukuhkoes98@gmail.com)

#### How to Cite :

Ayup. S. Aprudi., K. Koeswanto (2023). Pengelolaan E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas. SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities, 4(2)  
DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.4.2.413-420>

#### ARTICLE HISTORY

Received [09 November 2023]  
Revised [25 November 2023]  
Accepted [29 November 2023]  
Published [31 December 2023]

#### KEYWORDS

Maintainance, e-government, website

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sistem pemeliharaan E-Government dengan menggunakan website [musirawaskab.go.id](http://musirawaskab.go.id) dalam komunikasi, informasi dan statistik Kantor Negara di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dalam tahap reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, sistem pemeliharaan e-government belum tercapai sesuai dengan peraturan bupati nomor 68 tahun 2016 dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian. Kendala yang dihadapi dari sub aspek seperti kurangnya sumber daya manusia untuk memelihara sistem atau website yang membuat tampilan website tidak interaktif dan up to date dalam memberikan berita atau informasi. Selain itu, tidak ada prosedur operasional standar untuk menjadi panduan untuk memelihara sistem yang efektif.

#### ABSTRACT

The aim of this study is to see E-Government maintainance system by using [musirawaskab.go.id](http://musirawaskab.go.id) website in communication, information and statistic State Office in Musi Rawas regency. This is descriptive qualitative study through observation, interview and documentation then analyzed in the stage of data reduction, data display and drawing conclusion. Based on the result of this study, maintainance system of e-government has not been achieved in accordance to regent regulation number 68 of 2016 seen from planning, organizing, actuating, and controlling. The obstacles faced from the sub aspect such as lack of human resources to maintain the system or website that makes the appearance of website is not interactive and up to date in providing news or information. In addition, there's no standard operational procedure to be the guidance for maintaining effective system..

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan undang-undang.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan *e-Government* secara nasional. Penerapan *e-Government* dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (transparansi) dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Menurut Rahayu, dkk (2020) menyatakan bahwa era global saat ini sangat mendukung pemanfaatan teknologi dan informasi, maka sudah dipastikan bahwa semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan *e-Government* ini. Dalam arti umum, *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi di dalam sistem administrasi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan transparan sehingga lebih dimungkinkan untuk dapat memuaskan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 Pasal 16, Pengelolaan *e-Government* berada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tepatnya di Bidang Layanan *e-Government* dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola *e-Government*.
2. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola *e-Government*.
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola *e-Government*.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola *e-Government*.
5. Pelayanan filtering konten negatif.
6. Penetapan alokasi internet protokol dan numbering dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wujud nyata dari *e-Government* yang telah umum dikelola dan diatur pelaksanaannya adalah pengelolaan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah merupakan salah satu strategi didalam mengelola *e-Government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengelolaan *e-Government* di Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 tahun 2016 tentang Pengelolaan *e-Government* yang berada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Sebelumnya pengelolaan *e-Government* dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-Government*.

Pengelolaan *e-Government* diharapkan sebagai solusi yang tepat dalam bidang teknologi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui beberapa fenomena dalam penelitian ini, diantaranya Diskominfo Musi rawas sebagai pemelihara 36 *website* OPD yang ada di Musi Rawas, akan tetapi dari 36 *website* OPD tersebut, sebanyak 11 *website* OPD yang tidak dapat diakses dan 25 *website* OPD yang dapat diakses. Peneliti juga mendapatkan fenomena bahwa Diskominfo Musi Rawas sebagai pengelola *website* resmi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Hal ini dibuktikan ketika peneliti saat mengakses *website* Pemkab Mui Rawas yang tidak dapat diakses, tidak dicantumkan kontak pada menu hubungi kami, serta artikel berita yang tidak disajikan secara berkala.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengelolaan**

George R. Terry (2019, h.1) menjelaskan bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan orrganisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.

Kemudian Menurut Hasibuan (2017, h.2) pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Andre F. Sikula (dalam Hasibuan, 2017, h.2) Pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

### **E-Government**

Menurut Iwan Setiawan (2016, h.6) *E-government* adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah (seperti: *Wide Area Network, Internet dan mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan dalam paratekniknya. Pengertian lain disampaikan oleh Baker (dalam Rahayu dkk, 2020, h.237) *E-government* adalah suatu konsep kebijakan dan manajerial, yang sebenarnya hamper tidak memiliki dasar secara teoritis, meskipun dalam beberapa kasus sudah ada penelitian empiris yang berfokus pada dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap fungsi administrasi publik itu sendiri.

Selanjutnya Lee (dalam Rahayu dkk, 2020, h.237) menjelaskan bahwa *e-Government* secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan TIK untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah yang sebelumnya masih tradisional seperti penggunaan kertas kerja dan sistem manual lainnya. Kemudian Menurut Basu (dalam Rahayu dkk, 2020, h.237) *e-Government* lebih dari sekedar penggunaan *website* dan internet saja, yaitu bagaimana *e-Government* ini secara substansi harus bisa mendukung dan memudahkan urusan-urusan dari para pemangku kepentingan.

### **Konsep E-government**

Menurut Indrajit (2006, h.41) menjelaskan bahwa terdapat empat konsep *e-Government* yaitu :

- 1) *Government to Citizens* yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).
- 2) *Government to Business* yaitu dimana diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk mempelancar para praktisi bisnis dalam menjalankan rodad perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.
- 3) *Government to Government* yaitu dimana kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar Negara dan kerjasama antar entiti-entiti Negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lainnya).
- 4) *Government to Employess* yaitu untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

### **Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Rahman Mulyaman (2016, h.37) ada 10 prinsip pelayanan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;
- 2) Kejelasan  
Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- 3) Kepastian waktu  
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akurasi  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- 5) Keamanan  
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- 6) Tanggung jawab  
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (teletematika).
- 8) Kemudahan akses

Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi

- 9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- 10) Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskripsi kualitatif, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, melukiskan atau menggambarkan, menjelaskan suatu keadaan yang diteliti dengan kondisi yang sebenarnya. Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan *e-Government* di lokasi penelitian dalam kondisi alamiah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas mengenai bagaimana pengelolaan *e-Government* di Kabupaten Musi Rawas.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teori Ibrahim (2018, h.80) yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan suatu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat dikumpulkan. Sebaliknya, jika data tidak bias didapatkan atau tidak dapat dikumpulkan, maka sebuah penelitian dipandang tidak berhasil atau gagal.

### **Informan**

Teknik penentuan informan pada penelitian yang akan dilakukan adalah teknik *purposive sampling* (Ibrahim, 2018 h.72) yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti memerlukan informasi dari informan yang memahami segala sesuatu mengenai pengelolaan *e-government*. Peneliti menetapkan informan sebanyak 16 (enam belas) orang, yang diharapkan dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan *e-government*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Planning atau Perencanaan**

Salah satu wujud pengelolaan yang baik salah satunya dapat dilihat dari perencanaannya. Maka dari itu Diskominfo Musi Rawas dalam menjelaskan tugasnya harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan demi terlaksananya pengelolaan *E-Government* yang baik dalam rangka penggunaan website [musirawaskab.go.id](http://musirawaskab.go.id).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas pada aspek perencanaan (*planning*), yaitu mengenai SDM yang mengelola *website* sudah ada, hal ini dilihat dari Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 637 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pada dasarnya para operator sudah ada dalam mengelola *website*, yaitu 1 orang Kasi dan 2 operator sebagai

pengelola dan teknisi dan disetiap OPD juga telah ada masing-masing operator yang mengelola website. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SDM yang mengelola sudah tercapai baik, namun harus ada penambahan jumlah operator *website* apabila ingin lebih maksimal dalam mengelola *website*.

Untuk perencanaan waktu yang diperlukan dalam mempublikasikan sebuah informasi kedalam *website* masih belum tercapai dengan baik. Hal ini dilihat dari wawancara dengan operator *website* yang memberikan keterangan bahwa menunggu sore hari terlebih dahulu untuk mempublikasikan semua informasi yang telah terkumpulkan pada hari itu. Operator website tidak langsung mempostingnya secara *up to date*. Di Diskominfo mempublikasikan berita informasi pada sore hari, hal inilah yang menyebabkan *website* Musi Rawas terlihat kurang *up to date*.

Sedangkan untuk perencanaan biaya operasional dalam pengelolaan *website* sudah tercapai. Hal ini dilihat dari wawancara dengan Kabid dan Kasi *E-Government* Diskominfo yang memberikan keterangan bahwa biaya operasional terdiri dari honor dan pembayaran domain dan hosting website setiap bulannya, kemudian peneliti juga mendapatkan dokumentasi berupa *invoice* pembayaran CPanel dan VPS website musirawaskab.go.id.

### **Organizing atau Pengorganisaian**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas pada aspek pengorganisasian (*organizing*), mengenai penempatan dan pemberian latihan serta pengembangan kompetensi dan kemampuan anggota yang mengelola *website* belum ada. Dalam mengelola *website*, SDM harus mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola *website* dan teknologi informasi yang mumpuni. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan *softskill* operator yang mengelola *website*.

Selanjutnya penempatan SDM ke *jobdesk* yang mengelola *website* belum tercapai dengan baik. Hal ini dilihat dari pembagian tugas dalam mengelola *website* yaitu para operator juga memiliki tugas dibidang lain sehingga menyebabkan *website* yang kurang aktif. Setiap SDM sudah seharusnya yang mengelola *website* harus mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar pengelolaan *website* menjadi lebih baik. Selain itu belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat di Dinas Kominfo Musi Rawas untuk pengelolaan *website* sehingga pedoman pekerjaan operator *website* belum terstruktur.

### **Actuating atau Pengarahan**

Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Pengarahan disebut efektif, jika dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik serta benar oleh karyawan yang ditugasi.

Dalam pengelolaan *E-government* di Diskominfo, pengarahan yang baik dapat ditinjau dari sub aspek arahan dan motivasi dari atasan serta kerjasama dan koordinasi antara atasan dan bawahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas pada aspek pengarahan (*actuating*), untuk arahan dan motivasi dari atasan kepada anggota pengelola *website* sudah berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari hasil wawancara bersama Kabid *E-Government* yang mengatakan selalu memantau dan mengawasi pengelolaan *website*. Arahan dan motivasi ini sangat berpengaruh dan merupakan salah satu indikator yang menentukan baik atau tidaknya koordinasi antara atasan dan bawahan. Selain itu arahan akan membuat kinerja pengelola *website* agar lebih maksimal lagi dalam mengelola *website* setiap harinya.

Selanjutnya untuk kerjasama dan koordinasi antar atasan dan bawahan juga sudah berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja sejalan dengan motivasi yang telah diberikan, maka koordinasi dan kerjasama tentu akan berjalan.

### **Controlling atau Pengendalian**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas pada aspek pengendalian (*controlling*), untuk evaluasi jumlah artikel yang ditampilkan masih belum tercapai dilihat dari jumlah operator *website* di diskominfo yang hanya ada dua orang dan belum melaksanakan evaluasi jumlah artikel yang dipublikasikan. Evaluasi hanya dilakukan operator untuk mengetahui mana *website* yang aktif dan mana *website* OPD yang tidak aktif yang kemudian akan diberitahukan melalui whatsapp.

Kemudian untuk evaluasi kendala waktu yang diperlukan dalam mempublikasikan sebuah berita dan informasi dalam *website* juga belum tercapai. Hal ini dilihat dari pengelola *website* yang hanya ada dua orang, yang menyebabkan evaluasi hanya dilakukan seminggu sekali untuk melihat apakah website itu ada kerusakan atau tidak. Evaluasi waktu sangat diperlukan untuk membuat *website* sendiri terlihat menjadi lebih aktif dalam mempublikasikan sebuah informasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan *E-Government* di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas belum tercapai sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016. Hal ini dilihat dari aspek *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perencanaan waktu dan evaluasi waktu yang diperlukan dalam mempublikasikan sebuah artikel. Sehingga diharapkan pengelolaan *E-Government* dalam *website* akan semakin baik lagi kedepannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Pengelolaan *E-Government* dalam hal ini *website* belum tercapai sesuai Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 dilihat dari 4 aspek penelitian yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*.
2. Aspek *planning* sub aspek SDM yang mengelola sudah ada operator website, pada sub aspek perencanaan waktu belum tercapai dengan baik, pada sub aspek perencanaan biaya operasional sudah ada untuk membayar honor operator dan hosting domain.
3. Aspek *organizing* sub aspek penempatan dan pemberian pelatihan serta pengembangan kompetensi operator website belum terlaksana, dan pada sub aspek penempatan SDM ke jobdesk yang mengelola website belum terlaksana dengan baik.
4. Aspek *actuating* pada sub aspek arahan dan motivasi dari atasan sudah berjalan dengan baik dan sub aspek kerjasama

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasibuan, Malayu. 2017. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Sumedang: Unpad Press.
- Rahayu, dkk. 2020. *Pelayanan Publik Dan E-Government*. Depok: Kharisma Putra Utama
- Terry, George R. & Leslie. 2020. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuhefizar. 2013. *Cara Mudah & Murah Membangun & Mengelola Website*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.
- Atthahara, Haura. (2018). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Politikom Indonesiana, 3(1), 66-77.
- Setiawan, Iwan. (2016). *Pengelolaan E-Government Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas*. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, 5(3), 1-15.
- Zainuddin, Muhlis. (2014). *Efektivitas Penerapan E-Government Di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat*. Journal of Government and Political Studies, 2(2), 80-88.
- Buku *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian & SKRIPSI. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas 2021*.